

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERATAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)**

Muhammad Faisal Asariansyah, Choirul Saleh, Stefanus Pani Rengu,
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: faisalasarriansyah@yahoo.co.id

ABSTRACT: *Community participation in infrastructure development, especially roads obstacles still facing the Malang Regency in general and in particular District Lawang. The purpose of this study is to describe and analyze the distribution of community participation in road construction, supporting and inhibiting factors in community participation. This study use descriptive qualitative approach to the problem is the focus of Public Participation in the District Lawang road infrastructure development. This conclusion research community-based development assistance program (Bangsimas) gives authority to the widest rural communities to determine the future direction and objectives desired by the people in their respective villages. By optimizing the potential and capabilities of each rural community to make learning for rural communities in a development also take planning, implementation and use development in relation to construction roads and other infrastructure development.*

Keywords: Participation, Development, Road Infrastructure.

ABSTRAK: **Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur jalan merupakan kendala yang masih dihadapi kabupaten malang secara umum dan Kecamatan Lawang pada khususnya.** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan jalan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus permasalahan adalah Partisipasi Masyarakat Kecamatan Lawang pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. Kesimpulan dari penelitian program bantuan pembangunan berbasis masyarakat (Bangsimas) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lainnya.

Kata Kunci: partisipasi, pembangunan, pembangunan jalan

Pendahuluan

Realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara perkotaan dan pe-

desaan yang terlihat dari berbagai bidang, khususnya pada sektor ekonomi.

Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain. Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah. Untuk mengurangi bahkan meng-

hilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memperlakukan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Namun Sampai saat ini pembangunan masih berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan. Salah satu contoh ketidakmerataan pembangunan Indonesia dengan pembangunan masih berpusat di pulau Jawa, dimana banyak terdapat fasilitas yang memadai seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan sedangkan pulau kecil tidak mengalami pemerataan pembangunan, sehingga segala kebutuhan hidup penduduk sulit untuk didapatkan, seperti pelayanan kesehatan ataupun sarana pendidikan seperti daerah-daerah di Indonesia yang masih terpencil. Mereka harus bersusah payah untuk mendapatkan fasilitas seperti layanan kesehatan, pendidikan atau fasilitas-fasilitas lainnya mengingat jumlahnya yang sangat minim dan tempatnya yang jauh dari pemukiman penduduk. Ketimpangan pengelolaan merupakan wujud paling nyata dari kelemahan internal kekuasaan yang diharapkan mampu melaksanakan agenda pembangunan nasional bahkan pembangunan di daerah.

Kebijakan pemerintah harus dibuat pro-rakyat supaya hal dalam kemajuan pembangunan infrastruktur seperti pendidikan dan kesehatan agar dapat lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat telah berada dalam posisi yang semakin penting. Ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari terbukanya kran kebebasan berekspresi masyarakat akibat proses reformasi yang terjadi tahun 1998 di Indonesia. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih kritis dan terbuka mengkaji serta mengkritisi kebijakan-kebijakan yang

akan dan sedang dilakukan pemerintah. Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini. Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif.

Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Sekurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan. Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu indikasi yang mungkin timbul bisa jadi karena berangkat dari adanya ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapi masalah internal mereka.

Seringkali terjadi kerusakan pada tiap pembangunan jalan di Kecamatan Lawang membuat tiap warga yang melintasinya selalu resah. Ruas panjang yang mencapai 75,7 Kilometer kondisinya tidak mengalami perbaikan yang stabil. Tercatat tren perbaikan jalan semenjak tahun 2010 hingga 2012 mengalami penurunan kualitas. Semula 77% di tahun 2010 yang kemudian pada tahun 2011 turun jadi 72% dan pada tahun 2012 sampai 70% (UPT Dinas Bina Marga

Kecamatan Lawang). Jumlah ini tidak merepresentasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kecamatan Lawang. Apalagi dibandingkan dengan ruas-ruas yang ada pada pembangunan jalan di daerah perkotaan. Hampir ada ketimpangan antara jalan di ruas perkotaan dan pedesaan. Kondisi yang demikian menyebabkan diperlukan adanya dukungan mendalam dari masyarakat agar pembangunan jalan di Kecamatan Lawang khususnya di daerah pedesaan bisa berlanjut dengan baik mengingat Kecamatan Lawang sebagai pintu gerbang masuk wilayah Malang Raya secara geografis. Kondisi pembangunan jalan di antara ruas jalan perkotaan dan pedesaan baik itu di Kecamatan Lawang khusus maupun Kabupaten Malang secara umum masih jauh dari harapan tingkat baik dalam pembangunan. Kondisi tersebut juga sangat disayangkan karena hampir seluruh pembangunan jalan tersebut sangat sedikit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai kondisi yang dimiliki tiap-tiap dari individu tersebut meng-isyaratkan bahwa kepedulian masyarakat akan pembangunan dan kemajuan wilayah terlebih khususnya pembangunan jalan di pedesaan sangat kurang. Lemahnya kesadaran dan pelbagai hal lain dari masyarakat juga mempengaruhi tingkat kemauan untuk maju dalam sebuah wilayah. Apalagi menyangkut tatanan infrastruktur terutama pembangunan jalan.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pembangunan

Sebelum memberikan definisi kerja dari administrasi pembangunan, Siagian memisahkan pokok pengertian dari administrasi pembangunan. Menurutnya administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, Siagian (1973, h.4) mengemukakan bahwa: "administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya." Dan mengenai pembangunan, Siagian (1998, h.4) mendefinisikan sebagai: "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)."

Dari definisi pembangunan menurut Siagian tersebut, maka jelas dapat kita lihat pokok-pokok ide yang tersurat, yaitu adanya suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa. Definisi kerja (working definition) dari Administrasi Pembangunan menurut Siagian (2009, h.5) adalah "seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua perbaikan tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan akhirnya."

2. Paradigma Pembangunan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif menurut Samsura (2003, h.13) dianggap sebagai strategi pembangunan dan penentuan keputusan publik, sangat tergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, upaya pengikutsertaan masyarakat yang terwujud dalam perencanaan partisipatif, dapat membawa keuntungan substantif dimana keputusan publik yang diambil akan lebih efektif, disamping akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan publik yang cukup kuat terhadap suatu proses pembangunan. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik, memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri dan menjadi salah satu syarat penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai *participatory planning*, jika dikaitkan dengan

pendapat Friedman (1987, h.22) sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk pada pelaku pembangunan (stakeholders). Proses politik ini dilakukan secara transparan dan aksesibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap perkembangannya.

Selanjutnya Oetomo (1997, h.3) peran serta masyarakat dalam perencanaan adalah:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan.
- b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan.
- c. Pemberian masukan dalam perumusan Rencana Tata Ruang.
- d. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan.
- e. Pengajuan keberatan terhadap rancangan perencanaan.
- f. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan.
- g. Bantuan tenaga ahli.

Keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan sangat menentukan dalam merumuskan, melakukan pemilihan dan penilaian terhadap berbagai alternatif kegiatan yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa adanya kerjasama yang baik memberikan makna dalam perencanaan suatu pembangunan tidak dilakukan oleh sepihak, dan atas dasar tersebut masyarakat mempunyai hak dan wewenang untuk ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan pembangunan.

3. Partisipasi Masyarakat

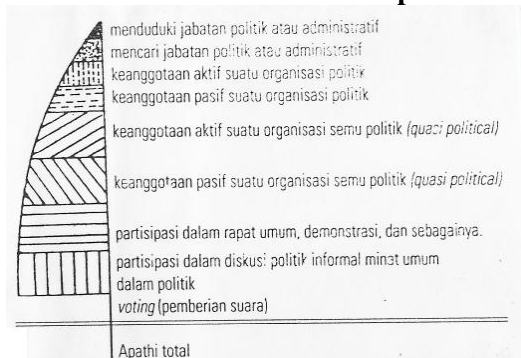
Sztompka (2007, h.65) menyatakan bahwa manusia ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik (*entity*), tetapi seperangkat proses yang saling terkait bertingkat ganda. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan jiplakan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Sifat berprosesnya masyarakat secara

tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab-akibat dengan fase kini dan fase kini merupakan persyaratan sebab-akibat yang menentukan fase berikutnya.

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik tetapi juga dalam proses hubungan sosial antara kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Hal ini dapat berupa sumbangan mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain. Pada pokoknya kegiatan masyarakat yang mendukung peningkatan tabungan dan investasi, dan dengan demikian pembentukan modal. Ketiga, adalah keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah ataupun golongan-golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif mereka melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu seperti yang diungkapkan Tjokroamidjojo (1995, h.207).

Siregar (2001, h.19) menyatakan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan. *Pertama*, kontribusi nyata secara sukarela dari komunitas terhadap suatu program untuk masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam implementasi program serta menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka. *Kedua*, meningkatkan kontrol terhadap sumber daya dan mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkut pengambilan keputusan pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.

Gambar Suatu Hierarki Partisipasi Politik



sumber: *Pengantar Sosiologi Politik, 2002*

Lain halnya dengan Rush dan Althoff (2002, h.129) adanya hierarki mencakup seluruh jajaran partisipasi politik dan untuk dapat diterapkan pada semua tipe sistem politik. Adalah penting juga untuk kita sadari bahwa partisipasi pada satu tingkatan hierarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang lebih tinggi, walaupun mungkin hal ini berlaku bagi tipe-tipe partisipasi tertentu. Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan.

Sementara Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990, h.4) menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

- Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
- Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
- Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
- Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Lebih rinci Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011, h.61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan

bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan.

4. Jalan

Jalan dalam hal ini juga ditemui beberapa hal yang membentuk terbentuknya perundang-undangan tentang jalan. Berikut ini hal yang menjadi pertimbangan menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

- bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional,
- bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan,
- bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan

berhasil guna diperlukan keterlibatan masyarakat.

Terdapat pada Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 pada pasal 1 sebagai berikut:

- a. Pada ayat 4: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

Oglesby dan Hiks (1988, h.181) mengemukakan jalan memiliki fungsi majemuk dimana jalan memungkinkan pemerintah untuk memberikan pelayanan pokok, memungkinkan mobilitas antar masyarakat bagi orang dan barang, memungkinkan pergerakan-pergerakan didalam setiap lingkungan dan memberikan jalan masuk ketempat hunian. Tetapi fungsinya yang paling penting menurutnya memberikan pelayanan pemerintahan dan mobilitas antar masyarakat.

Adapun sasaran pembangunan tahun 2011 – 2015 Kabupaten Malang yang terkait dengan adanya fungsi prasarana jalan dibidang sosial ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Yang masuk dalam 7 prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Malang adalah poin ke 3 tentang penyediaan infrastruktur yang memadai dimana pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perkeonomian, pariwisata dan dusun terpencil.
- b. Kemudian, pada tujuan pemerintah Kabupaten Malang poin ke 5 tentang menyediakan infrastuktur yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.

Sasaran diatas tidak terlepas dari trilogi pembangunan yang merupakan strategi dasar pembangunan kabupaten atau kota dan regional/daerah yaitu (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi, (2) pemerataan pembangunan dan, (3) stabilitas kabupaten atau kota dan pedesaan/kelurahan.

Perbaikan kondisi prasarana jalan memberikan manfaat kepada sosial ekonomi masyarakat, yaitu akan menyediakan akses menuju pasar dan tempat pelayanan sosial/publik, membangkitkan ekonomi lokal, meningkatkan produksi pangan dan membantu menyatukan komunitas terpencil ke dalam sebuah perekonomian yang luas menurut Parikesit(2002, h.97). Perbaikan kondisi jalan tersebut dapat berupa penambahan jalan baru atau peningkatan jalan.

Akses terhadap jalan akan memberikan kemudahan bagi pembangunan. Untuk populasi setempat, akses jalan sering sama pentingnya dengan jalan utama yang ditingkatkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa hanya sedikit terjadi perubahan di daerah perdesaan tanpa akses jalan menuju penghubung yang baru dibangun atau ditingkatkan walaupun hanya berjarak beberapa kilometer dari jalan utama. Akses jalan biasanya ditempatkan pada puncak dari daftar prioritas yang dibuat oleh desa.

Adapun kaitan pembangunan jalan yang masuk di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004.

- a. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
- b. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan
- c. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan
- d. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan
- e. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan
- f. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya

Dapat dilihat bahwa segala aktifitas penyelenggaraan jalan tidak terlepas dari pemerintah selaku pemegang otoritas pembangunan dan peran serta masyarakat. Bila dilihat pada hasil akhir sebuah pembangunan jalan, maka yang bisa memakai dan menggunakan jalan tersebut secara intens adalah masyarakat itu sendiri. Sebagai sarana penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain, satu urusan dengan urusan yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain, maka jalan akan memudahkan dari sisi sosial ekonomi.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam mendukung dan mempercepat aktivitas-aktivitas sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat. Bahkan dari berbagai studi sejarah yang pernah dilakukan, jalan merupakan sarana yang vital bagi tumbuh dan berkembangnya suatu peradaban. Dimasa lalu, daerah-daerah yang mampu tumbuh dan berkembang umumnya adalah daerah-daerah yang letaknya strategis dan berada ditepi jalan atau yang dilalui oleh jalan utama. Jalan dianalogikan sebagai urat nadi dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai sarana untuk mendukung masuknya energi yang diperlukan bagi perkembangan manusia.

Ada beberapa manfaat utama adanya infrastruktur jalan bagi masyarakat yaitu:

- a. Membuka keterisolasian wilayah dan daerah. Adanya jalan akan membuka wilayah-wilayah dan masyarakat yang dahulu terisolasi. Semakin terbukanya wilayah akan mempercepat perubahan-perubahan sosial yang merupakan prasyarat penting bagi proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran dan roda ekonomi wilayah. Adanya jalan akan mempermudah distribusi dan pemasaran suatu komoditi sehingga merangsang aktivitas dan tumbuhnya kegiatan perekonomian di daerah tersebut.
- c. Memperoleh akses teknologi dan pemanfaatan fasilitas sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan rencana pemindahan ibukota kabupaten dan lain-lain. Dengan adanya jalan fasilitas-fasilitas sosial akan dapat dicapai secara lebih mudah dan cepat

oleh masyarakat sehingga fasilitas tersebut terasa efektif dan efisien bagi masyarakat Kecamatan Lawang. Peningkatan mobilitas dan kontak sosial antar penduduk. Adanya jalan mempermudah hubungan antara suatu daerah dengan daerah lain.

Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat Kecamatan Lawang Dalam Pembangunan Jalan
 - a. Peran yang diberikan masyarakat Kecamatan Lawang dalam pembangunan jalan
 - b. Pola Penyelenggaraan pembangunan jalan pada satu desa dengan desa lain di Kecamatan Lawang
2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan.

Lokasi penelitian tertelak di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan situs penelitian di Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lawang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, metode pencatatan dan dokumentasi

Metode yang digunakan adalah Analisis Data Model *Spradley* yang dijabarkan dalam empat tahap yakni sebagai berikut:

1. Analisis Domain;

Analisis domain dilakukan saat peneliti memasuki objek penelitian yaitu Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Setelah melakukan pengamatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan deskriptif tersebut adalah suatu gambaran umum secara menyeluruh dan berbagai domain terkait gambaran Kecamatan Lawang dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan serta Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selaku aparatatur Pemerintah Kabupaten Malang sebagai produsen program.

2. Analisis Taksonomi;

Analisis taksonomi dilakukan dengan menentukan domain-domain tertentu yang dijadikan fokus penelitian. Setelah ditemukan berbagai kriteria dari analisis domain maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis taksonomi dengan cara menentukan dan mengelompokkan berbagai kategori yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan yang dilakukan oleh Kecamatan Lawang. Analisis ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terfokus.

3. Analisis Komponensial;

Analisis komponensial ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terseleksi untuk mencari ciri spesifik pada setiap struktur di suatu bidang. Dari analisis komponensial ini diperoleh beberapa data terkait kondisi pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

4. Analisis Tema Kultural;

Dilakukan dengan cara mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan yang selanjutnya dinyatakan dalam sebuah tema/judul penelitian. Dengan adanya Pembangunan Jalan sebagai instrumen penelitian akan menjadikan kegiatan Masyarakat dalam aktifitas sosial ekonomi akan terakomodir dan ini menjadikan penulis memfokuskan bidang penelitian pada topik ini karena ketika pembangunan terjadi langsung dibawa pada konteks realita akan lebih bisa diserap daripada sekedar teoritis.

Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat Kecamatan Lawang dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan

a. Peran yang diberikan oleh Masyarakat Kecamatan Lawang dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Lawang

Sebagai upaya meningkatkan kemandirian pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini dengan pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi masyarakat dan desa berupa pembangunan atau perbaikan prasarana yang ada di desa dengan memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama atau subjek pembangunan, maka pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Malang

membuat kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan bantuan keuangan bagi desa yang membutuhkan dana untuk kegiatan pembangunan prasarana dasar perdesaan yang segera harus diwujudkan melalui pendanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang yang didukung masyarakat secara terpadu dengan pola kemitraan. Keterpaduan tersebut dalam hal penyediaan anggaran maupun dalam hal pelaksanaan, sekaligus untuk membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat yang merupakan budaya Bangsa Indonesia yang sudah mengakar di masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Adapun maksud dan tujuan diberikan program Bangsimas agar mengembangkan dan memperkuat proses pelaksanaan kegiatan serta membantu percepatan pemberdayaan masyarakat dimana keduanya dilakukan melalui pendekatan pelaksanaan pembangunan desa dengan peningkatan transparansi dan peran serta masyarakat pada semua tahap pembangunan yang meliputi tahap pemilihan, perumusan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan. Program ini juga berguna sebagai pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan yang sudah dicapai. Serta peningkatan peran aktif masyarakat juga terakomodir dalam program ini.

Sasaran bantuan keuangan dengan Pola Pembangunan Sinergi Berbasis Masyarakat ini adalah jalan poros desa yang menghubungkan antar dusun/desa sesuai dengan usulan yang diajukan oleh desa pengurus di Wilayah Kabupaten Malang yang Prasarana dasar fisiknya dipandang belum cukup memadai. Dari 10 desa yang ada di Kecamatan Lawang seluruh desa mendapatkan program bantuan keuangan pembangunan jalan. Selama berjalannya pembangunan jalan banyak sumbangsih yang diberikan masyarakat guna memperlancar kegiatan pembangunan jalan tanpa dapat dihitung secara materi. Semisal dalam penyediaan konsumsi bagi para pekerja. Penduduk daerah sekitar lokasi pembangunan jalan sering kali memberikan konsumsi dalam berbagai bentuk. Dan dalam peranan ini masyarakat sekitar tidak merasa

terbebani dalam memberikan sumbangsuhnya pada para pekerja.

b. Pola penyelenggaraan pembangunan jalan pada satu desa dengan desa lain di Kecamatan Lawang

Setelah Sembilan desa menyetujui pengerjaan pembangunan jalan sesuai dengan rencana awal yakni semiran rusak berat dan lapen, Desa Sumberporong memiliki rencana yang berbeda dengan desa yang lain. Rencana awal yang dahulunya di program oleh Dinas Bina Marga mengerjakan semiran rusak berat setelah dimulainya musyawarah desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Sumberporong maka masyarakat memiliki pertimbangan lain dalam melaksanakan program tersebut.

Pernyataan dari masyarakat Desa Sumberporong mengenai perubahan pembangunan jalan disebabkan adanya beberapa pertimbangan. Diantaranya:

1. Kondisi jalan di RW 03 dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan sesegera mungkin
2. Jumlah penduduk yang banyak dan tingkat ekonomi masyarakat rata-rata yang masih prasejahtera sehingga diharapkan akses jalan yang memadai dapat meningkatkan ekonomi masyarakat RW 03
3. Tingginya rasa solidaritas, gotong royong dan partisipasi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dari seluruh hasil tersebut terdapat 3 desa yang mengikuti tahapan kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Tingkat keikutsertaan warga pada tiap desa tidak bisa disamakan. Dari sini ditunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bedali, Sumberporong dan Mulyoarjo memberikan perhatian yang lebih atas dibangunnya pembangunan jalan. Selain ketiga desa tersebut, masyarakat desa yang lain lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ini dibuktikan dengan keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan bahkan hanya pemanfaatan saja. Dapat disimpulkan dalam hal ini tingkat partisipasi yang ditunjukkan masyarakat Desa Bedali, Sumberporong dan

Mulyoarjo sangat besar dalam hal pembangunan jalan.

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Pembangunan Jalan Kecamatan Lawang Tahun 2012.

- a. Faktor pendukung:
Pertama Motivasi Masyarakat dalam Kemajuan Pembangunan Jalan. *Kedua*, Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Malang Selaku Produsen Program.
- b. Faktor Penghambat:
Pertama, iklim dan cuaca yang tidak menentu. *Kedua*, ketidakpedulian masyarakat desa dalam memajukan desa.

Kesimpulan

1. Partisipasi merupakan peningkatan dalam mengangkat moral masyarakat agar tertanam rasa kepedulian dari kondisi keterbelakangan dan ketidakmampuan dalam pemenuhan berbagai hal dalam kehidupan. Dalam berbagai hal sebuah partisipasi merupakan salah satu elemen terpenting terutama menyangkut pembangunan yang melibatkan masyarakat. Partisipasi juga menjadi tonggak awal dari sebuah perubahan yang mana dari awal yang ketidakberdayaan menjadi pemberdayaan.
2. Bantuan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bangsimas) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Keadaan sosial masyarakat sebuah kawasan tidak bisa dinilai sama dengan kawasan atau wilayah yang

lain. 3 desa yang terdapat di Kecamatan Lawang memiliki tingkat partisipasi yang lebih baik bila dikaji dengan kebijakan pembangunan jalan dibanding 7 desa yang lainnya dimana masyarakat di 3 desa tersebut ikut dalam perumusan pembangunan jalan, kemudian pekerjaan

pelaksanaan pembangunan jalan beserta penetapan lokasi yang akan diaspal sesuai dengan pertimbangan perumusan dan keputusan, dan pemanfaatan jalan. Bahkan peran di tingkat masing-masing individu tidak bisa disamaratakan. Ada yang memberikan andil dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti (2011). **Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Friedman, J. (1987). **Planning in the Public domain, from knowledge to action**. New Jersey: Princetown University Press
- Irfani, R. (2004). **Sekilas tentang Pendekatan Partisipatif**. Jakarta: UI-Press
- Mubyarto (1985). **Partisipasi dan Demokrasi di Perdesaan**. Jakarta: Suara Himpunan III (4) PBHMI
- Ndraha, Taliziduhu (1990). **Pembangunan Masyarakat**. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Oetomo, A. (1997). **Konsepsi dan Implikasi Penerapan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Indonesia**. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.8 No.2
- Oglesby, Clarkson H. dan Hiks, Gary R. (1988). **Teknik Jalan Raya**. Jakarta: Erlangga
- Parikesit (2002). **Pembangunan dan Manajemen pada pemerataan infrastruktur di Indonesia**. Yogyakarta: UGM Press
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip (2002). **Pengantar Sosiologi Politik**. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Samsura, D.A.A. (2003). **Participatory Planning, Good Governance dan Civil Society**. J
- Siagian, Sondang P. (1973). **Administrasi Pembangunan, konsep dimensi dan Strateginya**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (1998). **Administrasi Pembangunan, konsep dimensi dan Strateginya**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang P. (2009). **Administrasi Pembangunan, konsep dimensi dan Strateginya**, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siregar. I. (2001), **Tesis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**. Universitas Indonesia. Depok.
- Sztompka, Piotr (2007). **Sosiologi Perubahan Sosial**. Jakarta: Prenada
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1995). **Perencanaan Pembangunan**. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan** diakses pada tanggal 4 Maret 2013